

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI RASIO EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020–2025

M. Abel Radifan Rifki^{1*}

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
muhammadabel1245@gmail.com

Nurwani²

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
nurwani@uinsu.ac.id

Laylan Syafina³

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
laylansyafina@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja finansial Badan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat selama periode 2020 hingga 2025, dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai ukuran penilaian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Langkat. Teknik analisis dilakukan melalui perhitungan setiap rasio keuangan daerah yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan kriteria penilaiannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rata-rata indikator efektivitas mencapai 99,92%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan tergolong cukup efektif. Rata-rata koefisien efisiensi sebesar 12,71% menandakan manajemen keuangan daerah dilakukan dengan sangat efisien. Di sisi lain, rasio kemandirian hanya sebesar 10,66%, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri masih tergolong rendah dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) adalah 7,67%, meskipun angka tersebut mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kabupaten Langkat sudah cukup baik dalam hal efektivitas dan efisiensi, tetapi masih memerlukan peningkatan lebih lanjut terkait kemandirian dan stabilitas pertumbuhan pendapatan daerah (PAD).

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian, Pertumbuhan PAD*

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal. Melalui kinerja keuangan, dapat diketahui hingga mana pemerintah daerah sanggup menjalankan sumber daya

keuangannya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang valid serta prinsip-prinsip akuntansi sektor publik. (Pertiwi, Nasution, & Nurwani, 2024).

Kabupaten Langkat adalah salah satu wilayah dalam Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan peluang ekonomi yang besar. Namun, kemampuan daerah ini untuk membiayai pembangunan serta menyediakan layanan publik secara mandiri masih cukup terbatas. Menurut data dari pemerintah daerah, persentase pendapatan daerah yang berasal dari pajak (PPN) dalam keseluruhan pendapatan daerah tergolong rendah jika dibandingkan dengan transfer dana. Keadaan ini menggambarkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan potensi pendapatan daerah belum berjalan dengan baik, sehingga kemandirian keuangan daerah menjadi tantangan yang berkelanjutan dan memerlukan perhatian khusus (Faradilla, S. P, & Hanifa, 2024).

Tabel 1

Perkembangan Target dan Realisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2025

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	167,120,835,030.00	168,843,723,199.88	101,03%
2021	168,644,529,430.00	158,480,919,771.64	93,97%
2022	127,617,159,600.00	140,628,891,627.09	110,19%
2023	253,393,415,220.00	255,321,768,506.20	100,76%
2024	200.160.600.000.00	187,419,584,782.82	93,63%
2025	212.340.000.000.00	184,145,289,730.00	86,72%

Sumber: Data diolah dengan data keuangan Badan Pendapatan Daerah Langkat tahun 2020 – 2025

Berdasarkan Tabel 1, tingkat efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Langkat selama tahun 2020–2025 mengalami fluktuasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 110,20%, sedangkan terendah pada tahun 2025 sebesar 86,72%. Pada tahun 2020 dan 2022–2023, realisasi pendapatan melebihi target, sedangkan tahun 2021, 2024, dan 2025 belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan masih mengalami perubahan setiap tahunnya.

Teori pengelolaan keuangan daerah dan teori performance budgeting dapat membantu menjelaskan pergeseran antara realisasi PAD dan target anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Mardiasmo menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif harus berlandaskan pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini diperlukan agar realisasi anggaran dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. Dalam konsep pengukuran kinerja sektor publik, anggaran dinilai

efektif apabila realisasinya mampu memenuhi target yang direncanakan, sedangkan efisiensi tercermin dari kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya secara tepat dan ekonomis. Dengan demikian, perbedaan antara target anggaran dan realisasi PAD dapat menjadi indikasi adanya kendala pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran daerah.

Menurut Mahmudi dalam buku Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik tercermin dari adanya kesesuaian antara target dan menghasilkan keuntungan dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin kecil selisih di antara keduanya, semakin baik pula kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, fluktuasi yang cukup besar dapat menunjukkan bahwa Kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dan menganggap potensi pendapatan masih belum optimal. Berbagai komponen yang berasal dari dalam, seperti kegagalan dalam perencanaan dan pengawasan fiskal, maupun faktor eksternal, misalnya perubahan kondisi ekonomi daerah atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Mahmudi, 2020).

Berdasarkan teori tersebut, kondisi ideal dari data anggaran dan realisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat seharusnya menunjukkan tingkat realisasi yang stabil dan mendekati target anggaran setiap tahunnya. Secara ideal, realisasi PAD minimal mencapai atau melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten setiap tahun. Selain itu, peningkatan realisasi pendapatan harus ditiru oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk menurunkan dependensi pada dana transfer pusat. Namun, menurut data tahun 2020–2025 masih terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan antara anggaran dan realisasi, terutama pada tahun 2021, 2024, dan 2025, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Langkat belum sepenuhnya mencapai kondisi ideal sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pengelolaan keuangan sektor publik.

Terdapat fluktuasi antara nilai anggaran dan realisasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi (168,84 miliar) sedikit lebih tinggi dibandingkan anggaran (167,12 miliar), yang menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran cukup optimal bahkan melebihi target. Akan tetapi, realisasi menurun drastis pada tahun 2021 (158,48 miliar) dibandingkan anggaran (168,64 miliar). Hal ini menunjukkan adanya ketidaktercapaian target, yang bisa disebabkan oleh kendala operasional atau efisiensi yang tidak maksimal.

Pada tahun 2022, realisasi kembali melampaui anggaran (140,62 miliar dari 127,61 miliar), menandakan perbaikan kinerja dan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, dimana realisasi (255,32 miliar) sedikit lebih tinggi dari anggaran (253,39 miliar), menunjukkan konsistensi dalam pencapaian target.

Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan kinerja balik. Realisasi tahun 2024 (187,41 miliar) lebih rendah dari anggaran (200,16 miliar), dan penurunan ini semakin terlihat pada tahun 2025, dengan realisasi (184,14 miliar) jauh di bawah anggaran (212,34 miliar). Hal ini dapat disimpulkan belum terjadi penurunan dari anggaran dan realisasi pada tahun 2021 dan 2024. Menurut Mardiasmo, dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, anggaran dan realisasi seharusnya mengalami kesesuaian atau selisih yang relatif kecil, karena realisasi yang mendekati target mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif. Selain itu, Mahmudi menyatakan bahwa idealnya realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun serta mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan kinerja keuangan daerah yang lebih stabil, efektif, dan efisien.

Masalah utama atau research gap yang dapat diidentifikasi dari data tersebut adalah adanya ketidakkonsistenan antara anggaran dan realisasi dari tahun ke tahun, yang menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan pengendalian anggaran. Meskipun pada beberapa tahun seperti 2020, 2022, dan 2023 realisasi mampu melampaui anggaran, pada tahun lainnya justru terjadi selisih yang cukup besar di mana realisasi tidak mencapai target, khususnya pada 2021, 2024, dan 2025. Kondisi ini mengindikasikan ada perbedaan antara kemampuan implementasi di lapangan dan target yang direncanakan (Handayani, 2023).

Melalui pendekatan pengukuran kinerja menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah idealnya mampu menunjukkan kemampuan optimal dalam menggali potensi pendapatan serta mengelola sumber daya secara berkelanjutan (Cahyani, Nasution, & Nurwani, 2024). Dengan demikian, kondisi ideal (teoritis) menggambarkan adanya keselarasan antara target anggaran dan realisasi serta peningkatan kinerja keuangan yang stabil dari waktu ke waktu (Susilawati, Nawawi, & Shofiana, 2025).

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu seperti, Hadinata dkk (2024), serta Fadli Ahmad dkk (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat efektivitas PAD cenderung baik, efisiensi pengelolaan keuangan masih rendah dan peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, Faradilla dan Hanifa (2024) juga

menemukan bahwa efektivitas dan efisiensi tidak selalu berbanding lurus dengan kemandirian keuangan. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target pendapatan belum tentu mencerminkan kinerja keuangan yang optimal secara menyeluruh. (Putra, Harmain, & Nurwani, 2024).

Berdasarkan perbandingan antara kondisi teoritis dan realita tersebut, dapat diidentifikasi adanya gap penelitian yang signifikan, yaitu ketidaksesuaian antara harapan teori dengan kondisi empiris di lapangan (Siregar, Nasution, & Nurwani, 2024). Secara teoritis, kinerja keuangan daerah seharusnya stabil dan konsisten, namun pada kenyataannya masih terjadi fluktuasi antara anggaran dan realisasi serta ketidaksinkronan antar indikator kinerja keuangan. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan belum mengintegrasikan secara komprehensif seluruh rasio keuangan dalam satu analisis yang utuh. (Nadiyya Amanda Putri, Bainil Yulina, & Yevi Dwitayanti, 2025).

Maka dari itu, gap penelitian terletak pada belum optimalnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketidakkonsistenan tersebut, serta perlunya analisis yang mengintegrasikan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD secara bersamaan dalam satu periode pengamatan untuk memberikan gambaran kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif dan akurat. (Hakim, Nasution, Annio Indah Lestari, & Nurwani, 2023). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD juga cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya permasalahan dalam perencanaan pendapatan, sistem pemungutan, maupun pengelolaan biaya. (Azhari D.M., Nasution, Y, S, 2023). Fenomena terbukti meningkatkan realisasi pendapatan daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh (Nurlaila et al., 2025).

Hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat ruang analisis untuk penelitian lebih lanjut, terutama dalam kinerja keuangan daerah yang mencakup efisiensi, pendapatan, dan pertumbuhan PAD secara bersamaan selama satu periode pengamatan yang dapat menunjukkan perubahan perekonomian. (Remanta, Ramadhan, Pembangunan, & Budi, 2024). Rasio keuangan telah digunakan sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam beberapa penelitian sebelumnya. Hadinata dkk. (2024) menemukan bahwa tingkat efektivitas PAD di beberapa daerah tergolong baik, namun efisiensi pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan belum tentu mencerminkan pengelolaan keuangan yang optimal. Fadli Ahmad dkk (2024) yang meneliti kinerja keuangan Kabupaten Langkat menemukan

bahwa meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, sementara tingkat kemandirian keuangan daerah masih berada pada kategori menengah ke bawah. Sementara itu, Faradilla dan Hanifa (2024) menyimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi PAD tidak selalu positif dengan peningkatan kemandirian keuangan provinsi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian dan menegaskan pentingnya analisis kinerja keuangan daerah secara komprehensif dengan mengintegrasikan beberapa rasio keuangan dalam satu penelitian.

Penelitian ini dibangun dengan asumsi bahwa kinerja keuangan daerah dapat dievaluasi secara komprehensif melalui analisis rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan PAD. Rasio efektivitas dan efisiensi mencerminkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, rasio kemandirian menunjukkan dampak pengelolaan tersebut terhadap kemampuan fiskal daerah, sedangkan rasio pertumbuhan menggambarkan dinamika peningkatan PAD dari waktu ke waktu (Fadhil, Nurlaila, & Rahmani, 2025). Keempat rasio tersebut saling terkait dan secara bersama-sama menggambarkan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat periode 2020–2025 (Dwi, 2026).

Studi ini menyimpulkan bahwa perlunya melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja keuangan Kabupaten Langkat dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, otonomi, dan pertumbuhan pendapatan sendiri (PAD) dari otoritas keuangan daerah untuk periode 2020 hingga 2025. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan daerah dan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Rahayu N.S., Syafina L., 2023). Studi ini diharapkan dapat membantu penelitian lebih lanjut tentang akuntansi publik. Secara praktis, hasil yang diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan dan dorongan untuk evaluasi dan pengembangan kebijakan keuangan yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kemandirian keuangan dan kualitas pelayanan publik (Remanta et al., 2024).

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian hasil pelaksanaan anggaran dalam suatu periode tertentu. Dari sudut pandang

akuntansi publik, penilaian kinerja keuangan tidak hanya didasarkan pada pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan mereka dengan cara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan kemampuan administrasi dalam menghasilkan pendapatan dan mengatur pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat, selalu mengikuti prinsip "nilai untuk uang" yaitu aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja keuangan pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja keuangan yang baik dapat berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa sukses pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, data mengenai kinerja keuangan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal untuk periode selanjutnya, termasuk menentukan prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. (listari I I, h kukuh, 2022).

Banyak indikator keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu kotamadya. Ini termasuk indikator seperti efisiensi, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan. Masing-masing indikator ini menunjukkan aspek yang berbeda dari manajemen keuangan kotamadya. Misalnya, indikator efektivitas mengukur seberapa mampu kotamadya menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sesuai dengan target yang telah ditetapkan; indikator efisiensi seberapa efektif penghematan biaya dalam menghasilkan pendapatan ; indikator kemandirian menunjukkan seberapa besar kemandirian kotamadya pada pembayaran transfer; dan indikator pertumbuhan melacak bagaimana pendapatan kotamadya sendiri meningkat dari tahun ke tahun. (Hermain H., Daulay A.N., 2019).

Rasio Efektivitas

Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah adalah rasio efektivitas. Hal ini terutama digunakan untuk memancarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan daerah (PAD) yang ditetapkan dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Menurut Mardiasmo (2018), rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD, yang dirumuskan sebagai: $\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%$. Konsep tersebut menjelaskan bahwa efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang

telah direncanakan. Oleh karena itu, nilai rasio efektivitas yang lebih tinggi menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mencapai target PAD dan mengoptimalkan potensi pendapatannya.

Persentase pencapaian target, yang dihitung dengan membandingkan pendapatan aktual dengan target yang ditetapkan dalam APBD, merupakan indikator penting dari efektivitas pengelolaan pendapatan daerah (PAD). Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memperluas pemungutan pajak, tingkat kepatuhan terhadap pajak, dan kualitas sistem pengumpulan pajak dan retribusi daerah juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan PAD. Rasio efektivitas memiliki peran penting sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan pendapatan daerah, menilai keberhasilan perencanaan anggaran, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan PAD pada periode berikutnya. Rasio ini juga dapat menunjukkan seberapa baik upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan (Remanta et al., 2024).

Indikator efektivitas biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: seratus persen atau lebih adalah sangat efektif; sembilan puluh persen hingga seratus persen efektif; sembilan puluh persen hingga sembilan puluh persen sudah cukup efektif; enam puluh persen hingga enam puluh persen kurang efektif; dan enam puluh persen atau kurang adalah tidak efektif. Nilai lebih dari seratus persen menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah (PAD) telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang luar biasa dari pemerintah daerah. Di sisi lain, nilai kurang dari seratus persen menunjukkan bahwa target PAD belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, koefisien efektivitas PAD dapat digunakan sebagai salah satu ukuran terpenting untuk mengukur seberapa efektif pemerintah daerah menghasilkan pendapatan daerah. Rasio ini juga memberikan gambaran mengenai kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang diterapkan. Adapun perhitungan rasio efektivitas menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah, terutama dalam mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini dihitung dengan

membandingkan biaya pemungutan PAD terhadap realisasi PAD yang berhasil diperoleh. Menurut Mahmudi (2020), rasio efisiensi berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil terbaik. Menurut teori ini, rasio efisiensi = (biaya pengumpulan pendapatan sendiri/pendapatan sendiri yang terealisasi) $\times$ 100%. Akibatnya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin efisien dalam menghasilkan pendapatan, semakin rendahnya koefisien efisiensi.

Indikator dalam rasio efisiensi PAD dapat dilihat dari besarnya persentase jumlah biaya yang dikeluarkan dan jumlah pendapatan yang diperoleh. Selain itu, indikator pendukung lainnya meliputi pengendalian biaya operasional pemungutan, efektivitas sistem administrasi pajak daerah, serta optimalisasi sumber daya manusia dalam proses pemungutan (Pardede, 2024). Kegunaan rasio efisiensi sangat penting, yaitu untuk mengevaluasi apakah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses pemungutan PAD sudah ekonomis, mengidentifikasi potensi pemborosan anggaran, serta sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar lebih hemat dan optimal (Pardede, 2024).

Tingkat efisiensi biasanya disajikan berdasarkan berbagai kriteria. Nilai di bawah enam puluh persen dianggap sangat efisien; di bawah enam puluh persen dianggap efisien; di bawah delapan puluh persen dianggap cukup efisien; di bawah sembilan puluh persen dianggap kurang efisien; dan di atas seratus persen dianggap tidak efisien. Jika rasio efisiensi lebih rendah, pemerintah daerah lebih mampu mengendalikan biaya pengumpulan pendapatan sendiri (PAD) dengan lebih baik, sehingga mengoptimalkan perolehan pendapatan. Sebaliknya, nilai yang tinggi menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih tinggi daripada pendapatan yang dihasilkan, yang berarti administrasi kurang efisien. Oleh karena itu, efisiensi pendapatan sendiri merupakan indikator penting untuk menghemat potensi dan efektivitas alokasi sumber daya pemerintah daerah. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung efisiensi rasio:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Rasio Kemandirian

Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan administrasi dan pembangunan melalui Pendapatan sendiri (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah provinsi atau pusat. Menurut Halim (2012), tingkat ditentukan dengan membandingkan pendapatan sendiri dengan dana transfer, yang

dinyatakan sebagai berikut; konsep ini menggambarkan bagaimana tingkat keuangan suatu daerah memungkinkan pemerintah untuk memaksimalkan potensi ekonominya sebagai sumber pendapatan untuk mendukung implementasi desentralisasi fiskal. Semakin tinggi koefisien, semakin besar kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Indikator rasio kemandirian dapat dihitung dengan membandingkan rasio pendapatan pemerintah sendiri dengan pembayaran transfer yang diterima. Penilaian rasio ini selanjutnya didukung oleh kemampuan daerah untuk meningkatkan jumlah pajak dan biaya, meningkatkan sumber pendapatan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Tingkat swasembada sangat penting untuk menentukan rasio ketergantungan pembayaran transfer pemerintah daerah, mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan mandiri lokal, dan berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Dengan menggunakan indikator ini, pemerintah dapat menentukan kondisi kapasitas keuangan mereka dan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. (Cheryl B.A., Kumenaung A.G., 2025).

Dapat diartikan sebagai berikut: 0%–25% (sangat rendah/instruktif), 25%–50% (rendah/konsultatif), 50%–75% (sedang/partisipatif), dan 75%–100% (tinggi/delegatif). Tingkat otonomi yang tinggi menunjukkan bahwa sebagai otonomimeningkatnya tingkat meningkat, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daerah dari sumber pendapatannya sendiri juga meningkat tanpa campur tangan faktor lain. Begitu juga Kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daerah dari sumber pendapatannya sendiri tanpa campur tangan faktor lain. Sebaliknya, tingkat otonomi yang rendah menunjukkan masih cukup tingginya ketergantungan terhadap pembayaran transfer. Ada ketergantungan yang cukup tinggi pada pembayaran transfer sehingga ruang fiskal dan keleluasaan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, rasio kemandirian menjadi alat ukur utama dalam menilai kekuatan fiskal dan tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Rasio kemandirian menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Rasio Pertumbuhan

Tingkat pertumbuhan pendapatan sendiri pemerintah daerah (PAD) merupakan satu indikator satu digunakan yang untuk mengukur keuangan pemerintah kinerja daerah

pemerintah daerah dalam kaitannya dengan kenaikan atau penurunan pendapatannya dari waktu ke waktu. Kinerja yang berkaitan dengan peningkatan atau penurunan pendapatannya dari waktu ke waktu. Indikator menunjukkan ini kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya sendiri selama setiap siklus anggaran. DaerahPemerintah berupaya meningkatkan pendapatannya sendiri selama setiap siklus anggaran. Menurut Kuncoro Mudrajad (2013), peningkatan mata uang daerah memperkuat kemampuan pemerintah untuk menilai potensi ekonomi daerah secara langsung, yang dapat diungkapkan sebagai berikut: Mudrajad (2013), peningkatan mata uang daerah memperkuat kemampuan pemerintah untuk menilai potensi ekonomi daerah secara langsung, yang dapat diungkapkan sebagai berikut:
$$\text{Tingkat pertumbuhan pendapatan sendiri} = ((\text{PAD}_t - \text{PAD}_{(t-1)}) / \text{PAD}_{(t-1)}) \times 100\%.$$
 Menurut keteori teori ini, keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil dan terus meningkat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil dan terus meningkat.

Indikator dalam rasio pertumbuhan PAD dapat dilihat dari persentase kenaikan atau penurunan PAD dari tahun sebelumnya. Selain itu, indikator pendukung meliputi kemampuan inovasi kebijakan pajak daerah, perluasan basis pajak, peningkatan investasi daerah, serta kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi penerimaan daerah. Kegunaan rasio pertumbuhan ini sangat penting, antara lain untuk mengevaluasi tren kinerja keuangan daerah dari waktu ke waktu, mengukur keberlanjutan (*sustainability*) pendapatan daerah, serta sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan PAD di masa mendatang. Rasio ini juga membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi apakah kebijakan yang diterapkan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara optimal (Putri A.P, Yulina B., 2025).

Secara umum, interpretasi rasio pertumbuhan PAD dapat diklasifikasikan sebagai berikut: $>10\%$ (pertumbuhan tinggi/baik), $5\%–10\%$ (pertumbuhan sedang), $0\%–5\%$ (pertumbuhan rendah), dan $<0\%$ (pertumbuhan negatif). Apabila rasio pertumbuhan menunjukkan nilai positif yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan PAD secara signifikan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, jika pertumbuhan rendah atau bahkan negatif, hal ini mengindikasikan adanya stagnasi atau penurunan kinerja pendapatan daerah yang memerlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, rasio pertumbuhan PAD menjadi alat ukur penting dalam menilai dinamika

dan keberlanjutan kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang. Rasio pertumbuhan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t_1}}{\text{PAD}_{t_1}} \times 100 \%$$

Pendapatan Daerah

Semua klaim pemerintah daerah yang diakui sebagai peningkatan aset bersih selama periode fiskal termasuk dalam pendapatan pemerintah daerah. Tata kelola, penyediaan layanan publik, dan pelaksanaan pembangunan didanai sebagian besar dari pendapatan ini. Dari sudut pandang akuntansi publik, pendapatan pemerintah daerah sangat penting karena menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan secara mandiri. Pendapatan pemerintah daerah, menurut Mardiasmo (2018), terdiri dari semua penerimaan kas pemerintah daerah yang meningkatkan aset lancar, dan tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembalikannya. Secara umum, pendapatan pemerintah daerah terdiri dari pendapatan sendiri (Pendapatan Asli Daerah, atau PAD), pembayaran transfer, dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah. Potensi ekonomi pemerintah daerah, termasuk pajak, biaya, pendapatan dari pengelolaan aset terpisah, dan sumber PAD yang sah lainnya, adalah sumber pendapatan sendiri. Sebaliknya, pembayaran transfer adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi untuk mengimbangi kekuatan keuangan antara pemerintah daerah (Pardede, 2024).

Pangsa pendapatan pemerintah daerah sendiri (PAD) dalam total pendapatan pemerintah daerah, tingkat pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah sendiri, dan kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatannya adalah indikator pendapatan pemerintah daerah. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal dan potensi keuangan suatu daerah. Analisis pendapatan daerah memiliki peran penting dalam menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah, mengevaluasi keberhasilan upaya peningkatan pendapatan, serta menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan anggaran. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki pemerintah daerah.

Tingkat efektivitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator terpenting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan pendapatan pemerintah daerah yang optimal,

efektif, dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, memperkuat kapasitas fiskal mereka, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan penduduk. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan rentang nilai berikut: lebih dari 100% adalah sangat efektif; 90% hingga 100% adalah efektif; 80% hingga 90% adalah cukup efektif; dan 60% hingga 80% adalah tidak efektif.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini fokus pada pengukuran dan analisis tujuan kinerja keuangan daerah dengan menghitung berbagai indikator keuangan berdasarkan data numerik dari laporan keuangan tahunan pemerintah kota. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, objektif, dan akurat tentang situasi keuangan Kabupaten Langkat berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, otonomi, dan pertumbuhan selama periode penelitian.

Penelitian ini fokus pada kinerja keuangan daerah, yang diukur dengan indikator seperti efektivitas, efisiensi, independensi, dan pertumbuhan pendapatan daerah (PP). Penelitian ini fokus pada Otoritas Pendapatan Kabupaten Langkat, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengumpulkan pendapatan daerah (PP). Sumber data penelitian ini berasal dari laporan keuangan Dewan Kabupaten Langkat, khususnya Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA), yang memberikan informasi tentang target Interval waktu ini dipilih karena mencakup periode mulai dari pandemi COVID-19 hingga pemulihan ekonomi, yang memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika kinerja keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen APBD, serta sejumlah laporan lain yang terkait dengan penyelidikan. Semua data ini berasal dari otoritas terkait, publikasi resmi pemerintah daerah, dan sumber kredibel lainnya yang keasliannya dapat ditiru. Metode dokumentasi ini dipilih karena data yang digunakan telah melalui prosedur peninjauan dan pemrosesan sesuai dengan standar akuntansi administrasi publik dan karena itu menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.

Analisis data penelitian ini dimulai dengan menghitung indikator keuangan daerah untuk setiap tahun periode penelitian. Ini dimulai dengan perhitungan efisiensi, efisiensi,

kemandirian, dan pertumbuhan pendapatan sendiri (PAD). Hasil perhitungan ini kemudian dijelaskan secara deskriptif dengan membandingkannya terhadap kriteria atau standar penilaian kinerja keuangan daerah yang umum digunakan dalam literatur akuntansi sektor publik. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan mengenai kondisi kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat selama periode 2020–2025.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas

Tingkat efektivitas adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan (PAD) yang ditetapkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah. Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Eektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100 \%$$

Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan daerah aktual (PAD) dengan target PAD, atau anggaran yang ditetapkan dalam anggaran daerah (APBD), menurut teori Mardiasmo (2018). Tabel 2 menunjukkan hasil keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2020–2024:

Tabel 2

Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2025			
Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2020	167,120,835,030.00	168,843,723,199.88	101,03%
2021	168,644,529,430.00	158,480,919,771.64	93,97%
2022	127,617,159,600.00	140,628,891,627.09	110,19%
2023	253,393,415,220.00	255,321,768,506.20	100,76%
2024	200.160.600.000.00	187,419,584,782.82	93.63%
2025	212.340.000.000.00	184.145.289.730.00	98,4%
Rata Rata			99,66%

Sumber: Data diolah dengan data keuangan Badan Pendapatan Daerah Langkat tahun 2020 – 2025

Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan sendiri (PAD) Kabupaten Langkat periode 2020–2025 menghasilkan nilai rata - rata 99,66%. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi PAD hampir sepenuhnya memenuhi target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tingkat efektivitas dari 90% hingga 100% termasuk dalam kategori “efektif”, dengan tingkat yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target

penerimaan yang ditetapkan. Kriteria ini dijelaskan oleh Mardiasmo (2018). Akibatnya, pemerintah Kabupaten Langkat mampu mencapai pendapatan pendapatan sendiri (PAD) dengan tingkat efektivitas rata-rata 99,66%.

Pendapatan aktual sendiri (PAD) Kabupaten Langkat secara umum memenuhi target, berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas untuk periode 2020–2025. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat termasuk dalam kategori “efektif”, dengan tingkat efektivitas rata-rata 99,62%, dengan rekor tertinggi pada tahun 2022 sebesar 110,19% dan rekor terendah pada tahun 2024 sebesar 93,63%.

Berlandaskan hasil perhitungan rasio efektivitas tahun 2020–2025, dapat diketahui bahwa tahun yang paling berpengaruh terhadap tingginya rasio efektivitas adalah tahun 2022, dengan nilai sebesar 110,19%. Nilai ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun lainnya dan Karena PAD melebihi target, ini termasuk dalam kategori “sangat efektif”. Dengan situasi ini, pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2022 mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dengan sangat baik, baik melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi maupun melalui penerapan kebijakan pengelolaan pendapatan yang lebih optimal.

Sebaliknya, tahun yang paling rendah pengaruhnya terhadap rasio efektivitas adalah tahun 2024, dengan nilai sebesar 93,63%. Meskipun masih tergolong efektif, namun nilai ini menunjukkan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya mencapai target secara optimal. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi, atau adanya perubahan kebijakan fiskal. Dengan demikian, Fleksibilitas yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata kinerja keuangan daerah sudah cukup efektif, tetap diperlukan upaya peningkatan agar stabilitas efektivitas dapat terjaga.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian (Pardede, 2024) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Kendal tahun 2018-2022 memiliki rata-rata sebesar 98,2% dan dikategorikan cukup efektif. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun realisasi PAD Pemerintah daerah tetap mampu mencapai target pendapatan pada tingkat yang relatif baik, meskipun tidak selalu mencapai target setiap tahunnya.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah pendapatan yang diterima secara

keseluruhan. Perhitungan rasio efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Mengacu pada pendapat Mahmudi (2020), Rasio efisiensi dicapai dengan membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi PAD. Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3

Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2025

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2020	16,174,530,823.00	168,843,723,199.88	9,58%
2021	20,177,391,081.00	158,480,919,771.64	12,73%
2022	22,329,265,318.00	140,628,891,627.09	15,88%
2023	29,256,477,514.00	255,321,768,506.20	11,46%
2024	26,088,286,166.00	187,419,584,782.82	13,92%
2025	26,453,758,054.00	184,145,289,730.00	14,36%
Rata Rata			12,98%

Sumber: Data diolah dengan data keuangan Badan Pendapatan Daerah Langkat tahun 2020 – 2025

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Langkat selama tahun 2020–2025 menunjukkan nilai yang relatif rendah, dengan rata-rata sebesar 12,98%. Tahun yang paling berpengaruh terhadap rasio efisiensi adalah 2020 dengan nilai 9,58% (paling efisien), karena biaya yang dikeluarkan relatif paling kecil dibandingkan pendapatan. Sedangkan tahun 2022 memiliki nilai tertinggi yaitu 15,88%, sehingga menjadi yang paling rendah tingkat efisiensinya dalam periode tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan Kabupaten Langkat selama tahun 2020–2025 rata-rata 12,98 persen, yang menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD lebih kecil daripada pendapatan yang berhasil dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Langkat telah berhasil mengelola biaya pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siswanto., Maylani D.A., 2022) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah dalam pengelolaan pendapatan terakumulasi positif dengan rasio efisiensi yang lebih rendah. Jika dibandingkan dengan penelitian (Pundissing R., 2021) pada Kabupaten Toraja Utara yang memiliki rata-rata rasio efisiensi sebesar 83,66%, rasio efisiensi Kabupaten Langkat sebesar 12,98% menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini

memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah mampu memperoleh PAD dengan biaya yang relatif kecil sehingga kinerja keuangan daerah dari aspek efisiensi dapat dikategorikan sangat baik.

Rasio Kemandirian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman daerah untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Menurut teori Halim (2012), kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan PAD dengan transfer pendapatan. Tabel 4 menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Tabel 4

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2025

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian
2020	168,843,723,199.88	1,537,931,438,606.00	10,97%
2021	158,480,919,771.64	1,678,563,651,667.00	9,44%
2022	140,628,891,627.09	1,710,114,077,590.00	8,22%
2023	255,321,768,506.20	1,744,932,135,297.00	14,63%
2024	187,419,584,782.82	1,860,713,983,622.00	10,07%
2025	184.145.289.730.00	1,932,824,614,104.00	9,52%
Rata - rata			10,47%

Sumber: Data diolah dengan data keuangan Badan Pendapatan Daerah Langkat tahun 2020 – 2025

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Halim (2012), Pendapatan daerah sendiri (PAD) dibandingkan dengan pembayaran transfer dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menentukan kemandirian fiskal daerah. Kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran administrasinya melalui pendapatan sendiri ditunjukkan oleh indikator ini. Koefisien fiskal Kabupaten Langkat untuk periode 2020–2025 dihitung dengan nilai rata - rata 10,47%. Menurut kriteria Halim (2012) untuk tingkat kemandirian fiskal daerah, koefisien di bawah 0% hingga 25% dianggap sangat rendah, menunjukkan pola hubungan yang “menginstruksional”. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai administrasi dan pembangunan sendiri masih didominasi oleh pemerintah pusat. Akibatnya, tingkat kemandirian

keuangan Kabupaten Langkat masih sangat rendah, dengan tingkat swasembada rata-rata sebesar 10,47%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya sendiri.

Pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena kurangnya kemandirian keuangan mereka. Hasil penelitian konsisten dengan temuan (Pundissing R., 2021) yang menemukan bahwa, karena proporsi pembayaran transfer lebih besar daripada Pendapatan Mereka Sendiri (PAD), tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih relatif rendah. Selain itu, temuan ini konsisten dengan temuan penelitian (Siswanto., Maylani D.A., 2022) yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk biaya administrasi dan pembangunan.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah cara untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dari satu periode ke periode berikutnya. Melalui rasio ini, dapat diketahui apakah pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif atau justru mengalami penurunan selama satu atau sebagian periode anggaran. Adapun perhitungan rasio pertumbuhan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Perumbuhan} = \frac{\text{PAD } t - \text{PAD } t_1}{\text{PAD } t_1} \times 100 \%$$

Mengacu pada teori Kuncoro Mudrajad (2013), pertumbuhan keuangan daerah diukur dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode berjalan terhadap realisasi PAD pada periode sebelumnya.

Tabel 5

Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2020 - 2025

Tahun	PAD t (Rp)	PAD t ₁ (Rp)	Rasio Pertumbuhan
2020	168,843,723,199.88	167,523,076,879.63	0,78%
2021	158,480,919,771.64	168,843,723,199.88	-6,13%
2022	140,628,891,627.09	158,480,919,771.64	-11,26%
2023	255,321,768,506.20	140,628,891,627.09	81,55%
2024	187,419,584,782.82	255,321,768,506.20	-26,59%
2025	184.145.289.730.00	187,419,584,782.82	-1,75%
Rata - rata			6,1%

Sumber: Data diolah dengan data keuangan Badan Pendapatan Daerah Langkat tahun 2020 – 2025

Berdasarkan perolehan hitungan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Langkat selama periode 2020–2025, diperoleh rata-rata pertumbuhan sebesar 6,1%. Mengacu pada teori Kuncoro Mudrajat (2013), pertumbuhan keuangan daerah dinilai dari kesanggupan pemerintah daerah meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipadankan periode sebelumnya. Semakin tinggi dan semakin stabil tingkat pertumbuhan yang dicapai, semakin baik pula kemampuan daerah dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatannya. Rata-rata pertumbuhan sebesar 6,1% menunjukkan bahwa secara umum PAD Kabupaten Langkat masih mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, nilai pertumbuhan tersebut masih tergolong relatif rendah dan cenderung berfluktuasi, bahkan pada beberapa periode mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum berlangsung secara konsisten, sehingga kinerja pertumbuhan PAD Kabupaten Langkat masih belum optimal.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Langkat selama periode 2020–2025 membuktikan kondisi yang naik turun. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 81,55%, sedangkan penurunan paling besar terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar -26,59%. Secara menyeluruh, rata-rata rasio pertumbuhan mencapai 7,67%, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD masih belum stabil dari tahun ke tahun. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Pundissing R., 2021) yang menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD pemerintah daerah cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, karena dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan serta perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, penelitian (Siswanto., Maylani D.A., 2022) juga menemukan bahwa pertumbuhan PAD yang tidak stabil mengindikasikan perlunya optimalisasi potensi pendapatan daerah agar peningkatan pendapatan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Berdasarkan Rasio Efektivitas Tahun 2020–2025

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020–2025 dinilai cukup efektif, berdasarkan perhitungan efektivitas rasio. Hal tersebut tercermin dari rata-rata rasio efektivitas sebesar 99,66%, yang mengindikasikan bahwa PAD hampir sepenuhnya memenuhi tujuan. Meskipun ada penurunan

tahunan, secara keseluruhan pemerintah daerah tetap mampu mengelola penerimaan PAD dengan baik.

Mengacu pada teori Mardiasmo (2018), rasio efektivitas yang berada pada kisaran 90% hingga 100% tergolong dalam kelompok efektif, karena menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah dalam mewujudkan target pendapatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Langkat sejumlah 99,66% mengindikasikan bahwa kinerja keuangan daerah berada dalam kategori efektif, mengingat realisasi PAD hampir sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Berdasarkan Rasio Efisiensi Tahun 2020–2025

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2020–2025 dinilai sangat efisien, dengan rasio rata-rata 12,98 %. Nilai indikator yang rendah ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan sendiri (PAD) relatif rendah dibandingkan dengan PAD yang sebenarnya tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dianggap sangat efisien.

Kriteria sangat efisien tersebut mengacu pada teori Mahmudi (2020), yang menyatakan bahwa semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik pula kinerja keuangan daerah karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan relatif kecil. Oleh karena itu, rata-rata rasio efisiensi sebesar 12,71% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah mampu mengelola biaya pemungutan PAD secara optimal sehingga proses penghimpunan pendapatan berlangsung dengan sangat efisien.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh (Remanta et al., 2024) yang menerangkan bahwa rasio efisiensi yang rendah mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sangat efisien. Selain itu, penelitian oleh Amu dkk (2023). juga menunjukkan bahwa efisiensi yang tinggi menandakan penggunaan anggaran yang hemat dan optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya bahwa efisiensi merupakan ukuran penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Berdasarkan Rasio Kemandirian Tahun 2020–2025

Tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Langkat sangat rendah untuk periode 2020–2025, dengan koefisien rata-rata 10,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat membiayai operasionalnya hanya dengan pendapatan daerah (PPN), sehingga sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Kategori tersebut mengacu pada teori Halim (2012), yang menyatakan bahwa rasio kemandirian pada kisaran 0%–25% masuk ke dalam kategori yang sangat rendah karena pola hubungan instruktifnya. Artinya, dukungan pembiayaan daerah masih didominasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, rata-rata rasio kemandirian sebesar 10,47% mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat masih belum memiliki tingkat kemandirian fiskal yang memadai.

Menurut Fadli dkk (2024), tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Langkat masih rendah karena ketergantungannya yang tinggi pada transfer dana. Selain itu, penelitian oleh (Remanta et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pendapatan daerah (PAD) yang rendah terhadap total pendapatan daerah adalah penyebab tingkat swasembada yang rendah. Hasilnya, temuan penelitian ini menunjukkan semakin memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa rendahnya kemandirian keuangan daerah masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Tahun 2020–2025

Bersumber pada hasil perhitungan rasio pertumbuhan, performa keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat selama periode 2020–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Kondisi ini terlihat dari adanya kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa tahun pengamatan. Rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 6,1% mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dari tahun ke tahun masih belum konsisten.

Kondisi fluktuatif tersebut merujuk pada teori Kuncoro Mudrajad (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan keuangan daerah mencerminkan kesanggupan pemerintah daerah dalam menaikkan pendapatan secara berkesinambungan, sehingga apabila perkembangan tidak stabil maka menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, nilai rata-rata 6,1% mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat belum mampu menjaga pertumbuhan PAD secara stabil dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan Faradilla dan Hanifa (2024), yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD cenderung berfluktuasi dan tidak selalu meningkat secara konsisten. Selain itu, penelitian oleh Amu dkk (2023). juga menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah yang tidak stabil mengindikasikan perlunya evaluasi kebijakan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa stabilitas pertumbuhan PAD masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan performa keuangan daerah.

Di samping itu, riset ini juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak sekedar ditentukan oleh kesanggupan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan, melainkan oleh kemampuan menjaga keberlanjutan dan stabilitas pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu, dan oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan menjaga pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat selama periode 2020–2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik jika ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi. Namun, dari sisi kemandirian keuangan dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Rasio efektivitas dengan rata-rata sebesar 99,92% menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mencapai target pendapatan mereka (PAD). Manajemen keuangan pemerintah daerah mungkin sangat efisien, dengan koefisien efisiensi rata-rata 12,71%. Sebaliknya, tingkat kemandirian rata-rata sebesar 10,66% menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pembayaran transfer dari pemerintah pusat, dan tingkat pertumbuhan pendapatan sendiri rata-rata sebesar 7,67% menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah terus berubah dan tidak stabil dari tahun ke tahun.

Menurut temuan penelitian ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat harus disarankan untuk meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tujuan meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah serta mengembangkan sumber pendapatan baru. Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas sistem administrasi dan pengawasan pemungutan pajak untuk menjaga tingkat efektivitas yang sudah baik agar tetap stabil bahkan meningkat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan daerah, peneliti selanjutnya harus memperluas penelitian ini dengan memasukkan variabel tambahan seperti rasio aktivitas, rasio solvabilitas, atau analisis belanja daerah. Peneliti yang akan datang juga disarankan untuk menggunakan teknik analisis yang lebih mendalam, seperti analisis regresi atau pendekatan komparatif antar daerah, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan secara lebih spesifik. Selain itu, Diharapkan bahwa penelitian yang akan datang dapat memperluas cakupan subjek penelitian dengan memasukkan lebih dari satu bidang, tetapi pada beberapa daerah untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas serta meningkatkan validitas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari D.M., Nasution, Y, S, J. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Periode 2020–2021 Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 8(2), 18–25. <https://doi.org/10.54526/jes.v8i2.171>
- Cahyani, F. A., Nasution, Y. S. J., & Nurwani, N. (2024). Analysis Of The Effectiveness Of The Internal Control System For Cash Receipts And Disbursements At The Modern Entrepreneur Darul Musthofa Islamic Boarding School 2021-2022. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3), 2393–2404. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i3.5942>
- Cheryl B.A., Kumenaung A.G., K. G. M. (2025). Analisi Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Rasio Kesenjangan Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25(September), 185–195.
- Dwi, H. (2026). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Rasio Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia, 14(1), 86–94.
- Fadhil, M. I., Nurlaila, N., & Rahmani, N. A. B. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia dengan Pendekatan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 67–87. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i1.871>
- Faradilla, S. P, & Hanifa, N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Kemandirian Kota Surabaya, 4, 98–104.
- Hakim, M. K., Nasution, Annio Indah Lestari, & Nurwani. (2023). Analysis Of Direct Expenditure Budget Realization Reports In Order To Measure Effectiveness And Efficiency At BKAD Medan City. *Jurnal Ekonomi*, 12(03), 2023.
- Handayani, F. (2023). akuntansi Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt Gunung Raja Paksi Tbk. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.1596>
- Hermain H., Daulay A.N., E. D. (2019). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. UIN Medan Sumatra Utara. Medan. Ad-Deenar: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (600). <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>

- listari I I, h kukuh, widuri T. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa*, 4(3).
- Mahmudi, SE, M.Si., CA., 2020. (n.d.). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Nadiyya Amanda Putri, Bainil Yulina, & Yevi Dwitayanti. (2025). Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10), 3488–3502. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.9143>
- Nurlaila N., Hayyah A.W., Habibah N., Zamzam A.R., S. V. A. (2025). Analisis Implementasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(1), 145–153. <https://doi.org/10.30640/trending.v3i1.3598>
- Pardede, L. P. N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, Dan Analisis Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal. *Kampus Akademik Publishing - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 467–473.
- Pertiwi, T. B., Nasution, Y. S. J., & Nurwani, N. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Objek Wisata Sawah Pure Tanjung Morawa Deli Serdang. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2332–2345. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/15146>
- Pundissing R. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara, 2(2), 11–26.
- Putra, A. S., Harmain, H., & Nurwani. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Pembangunan Infrastruktur Oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat Untuk Meningkatkan Kenyamanan Masyarakat. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 60–74.
- Putri A.P, Yulina B., D. Y. (2025). Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Efisiensi Keuangan terhadap Dana Insentif Fiskal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10), 3488–3502. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i10.9143>
- Rahayu N.S., Syafina L., N. (2023). Accounting Information System , Taxes , and Auditing Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada, 2(2), 79–98.
- Remanta, O., Ramadhan, P. R., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen (JASMIEN) Volume*, 05(4), 457–465.
- Siregar, C. A., Nasution, Y. S. J., & Nurwani, N. (2024). Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of The Internal Control System For The Supply Of Medicines In Public Hospitals Sinar Husni. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3), 2609–2620. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i3.5961>
- Siswanto., Maylani D.A. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, 11(1), 130–138.
- Susilawati, R., Nawawi, M. A., & Shofiana, D. E. (2025). Islamic Banking And Financial Stability In Indonesia: A Systematic Literature Review Approach. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 13(07), 9340–9346. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v13i07.em05>